**Strategi Peningkatan Kapasitas Manajemen Administrasi Pemerintahan Distrik: Studi di Distrik Sorong Timur**

Saiful Ichwan¹.

¹Ichwan.ipul@gmail.com.

¹²Universitas Muhammadiyah Sorong

***Abstract***

*This study aims to identify and analyse strategies that can be applied to improve the administrative management capacity of the East Sorong District, Sorong City. The main problems faced are low administrative management efficiency, limited human resources, and insufficient use of technology to support the administrative process. This study employs a qualitative approach using the case study method, where data is collected through in-depth interviews, field observations, and documentation from district officials and relevant stakeholders. The results of the study indicate that administrative capacity can be improved through three main strategies, namely: (1) strengthening the competence of officials through continuous training and mentoring; (2) improving performance-based internal management systems; and (3) utilising information technology to accelerate public service processes. The implications of these findings highlight the importance of institutional support and consistent regional policies in supporting bureaucratic reform at the district level.* *This study is expected to serve as a reference for local governments in designing policies to improve administrative capacity in a sustainable manner.*

*Keywords: administrative management, government capacity, improvement strategies, districts.*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan kapasitas manajemen administrasi pemerintahan di Distrik Sorong Timur, Kota Sorong. Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya efisiensi tata kelola administrasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses administrasi pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi dari aparat distrik dan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas administrasi dapat dicapai melalui tiga strategi utama, yaitu: (1) penguatan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan; (2) perbaikan sistem manajemen internal yang berbasis kinerja; dan (3) pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses layanan publik. Implikasi dari temuan ini menunjukkan pentingnya dukungan kelembagaan dan kebijakan daerah yang konsisten dalam mendukung reformasi birokrasi di tingkat distrik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan peningkatan kapasitas administrasi secara berkelanjutan.

Kata Kunci**:** manajemen administrasi, kapasitas pemerintahan, strategi peningkatan, distrik.

### ****Pendahuluan****

Manajemen administrasi pemerintahan merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di tingkat lokal. Efektivitas administrasi yang baik mencerminkan kinerja birokrasi yang mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan transparan. Di tengah meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang berkualitas, aparatur pemerintah di tingkat distrik dituntut untuk memiliki kapasitas yang memadai dalam mengelola sistem administrasi secara profesional dan efisien.

Distrik Sorong Timur sebagai salah satu wilayah administratif di Kota Sorong memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan pelayanan dasar kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi manajemen administrasi, antara lain terbatasnya kompetensi sumber daya manusia (SDM), lemahnya koordinasi antarunit kerja, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan publik dan lambannya proses pengambilan keputusan di tingkat distrik.

Sejumlah pakar dalam satu dekade terakhir menegaskan pentingnya penguatan kapasitas birokrasi lokal sebagai bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan. Menurut Dwiyanto (2015), birokrasi lokal di Indonesia sering kali mengalami stagnasi kinerja karena minimnya pengembangan kapasitas individual dan kelembagaan secara sistemik. Hal ini diperkuat oleh pendapat Wahyudi (2017), yang menyatakan bahwa keberhasilan pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan administratif dan manajerial aparatur pemerintah, terutama di level paling dekat dengan masyarakat, yakni kecamatan dan distrik.

Sementara itu, Osborne (2018) dalam pendekatannya tentang ***New Public Governance*** menekankan pentingnya kolaborasi, transparansi, dan adaptasi teknologi sebagai kunci peningkatan kualitas administrasi publik. Di sisi lain, Nugroho (2019) menyoroti perlunya penyelarasan antara kebijakan pusat dan pelaksanaan teknis di daerah untuk menghindari ketimpangan kapasitas. Selain itu, berdasarkan studi oleh Arifin dan Siregar (2021), salah satu tantangan utama dalam administrasi pemerintahan distrik adalah lemahnya sistem pengawasan internal serta rendahnya pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan.

Berbagai studi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas administrasi tidak hanya membutuhkan intervensi teknis semata, melainkan juga strategi kelembagaan, penguatan tata kelola, serta investasi berkelanjutan dalam pengembangan SDM. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga menjadi faktor kunci dalam menciptakan proses administrasi yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel (Yudhistira, 2020).

Melalui penelitian ini, penulis berupaya mengidentifikasi strategi-strategi peningkatan kapasitas manajemen administrasi pemerintahan yang relevan dan aplikatif di Distrik Sorong Timur. Fokus utama terletak pada pendekatan yang menyentuh aspek kompetensi aparatur, penguatan sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi sebagai pendorong reformasi administratif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah sekaligus menjadi masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan publik yang efektif dan responsif di tingkat distrik.

Menurut Dwiyanto (2015), rendahnya kinerja pemerintahan daerah banyak disebabkan oleh lemahnya kapasitas administrasi, baik dalam hal prosedur kerja, pemanfaatan teknologi, maupun kemampuan kepemimpinan lokal. Hal ini diperkuat oleh Haris dan Sari (2018), yang menyebutkan bahwa aparatur di level kecamatan dan distrik sering kali tidak mendapatkan pelatihan berkala dan sistem evaluasi kinerja yang memadai, sehingga sulit menciptakan inovasi layanan publik.

ejalan dengan itu, Kettl (2017) menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan integrasi antara kapasitas administrasi, struktur kelembagaan yang kuat, dan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Penelitian oleh Nugroho (2019) juga menggarisbawahi pentingnya penguatan tata kelola di tingkat lokal sebagai prasyarat utama dalam mewujudkan desentralisasi yang efektif.

Konsep penguatan kapasitas kelembagaan juga didukung oleh UNDP (2020), yang menyatakan bahwa peningkatan kapasitas institusi pemerintahan lokal harus mencakup tiga aspek utama: pengembangan individu (SDM), reformasi kelembagaan, dan pembangunan sistem kerja yang mendukung efektivitas layanan. Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan otonomi daerah membuka peluang besar bagi penguatan kapasitas manajemen di tingkat distrik, namun juga membawa tantangan tersendiri jika tidak diiringi dengan dukungan sumber daya dan kebijakan yang konsisten (Sutrisno, 2021).

Berbagai studi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas administrasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan strategi terintegrasi yang mencakup pelatihan aparatur, pembenahan sistem kerja internal, peningkatan sarana prasarana, serta reformasi kelembagaan yang menekankan prinsip akuntabilitas dan pelayanan prima.

Melalui penelitian ini, penulis berupaya mengidentifikasi dan menganalisis strategi peningkatan kapasitas manajemen administrasi yang relevan dengan kondisi nyata di Distrik Sorong Timur. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan tujuan menyusun rekomendasi strategis yang dapat diterapkan secara praktis dan berkelanjutan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik maupun kebijakan dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat distrik sebagai garda terdepan pelayanan publik di daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** dengan metode **studi kasus** untuk memahami secara mendalam strategi peningkatan kapasitas manajemen administrasi di lingkungan pemerintahan Distrik Sorong Timur, Kota Sorong. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena yang kompleks dan kontekstual secara menyeluruh, khususnya berkaitan dengan dinamika internal pemerintahan dan interaksi antar aktor yang terlibat dalam proses administrasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Distrik Sorong Timur, Kota Sorong. Subjek penelitian terdiri atas aparatur pemerintah distrik (kepala distrik, sekretaris distrik, kepala seksi), staf administrasi, serta pemangku kepentingan lokal seperti tokoh masyarakat dan perwakilan LPMK.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Kondisi Kapasitas Manajemen Administrasi di Distrik Sorong Timur**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam, ditemukan bahwa kapasitas manajemen administrasi di Distrik Sorong Timur masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa permasalahan utama yang diidentifikasi meliputi:

* Rendahnya kompetensi aparatur dalam pengelolaan administrasi berbasis digital.
* Kurangnya sistem manajemen kinerja dan evaluasi internal.
* Lemahnya koordinasi antarunit kerja dan kurangnya dokumentasi prosedur kerja yang baku.

Permasalahan ini sejalan dengan temuan Haris dan Sari (2018), yang menyatakan bahwa kelemahan birokrasi lokal di Indonesia banyak disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM dan ketidakterpaduan sistem kerja di level distrik dan kecamatan. Nugroho (2019) juga menambahkan bahwa sistem administrasi publik yang belum terdigitalisasi secara menyeluruh menjadi hambatan dalam pencapaian efektivitas pelayanan publik di daerah.

#### **2. Strategi yang Diterapkan Pemerintah Distrik**

Dari hasil wawancara dengan kepala distrik dan staf administrasi, ditemukan bahwa upaya strategis yang telah dan sedang dilakukan meliputi:

* **Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas SDM**: Pemerintah distrik telah bekerja sama dengan pemerintah kota dalam menyelenggarakan pelatihan dasar administrasi dan penggunaan sistem informasi manajemen pemerintahan daerah (SIMDA).

Hal ini sejalan dengan pendapat UNDP (2020), yang menekankan bahwa peningkatan kapasitas institusi tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada peningkatan kapasitas individu dan organisasi secara bersamaan.

* **Digitalisasi Administrasi:** Pemerintah distrik mulai menerapkan pencatatan digital untuk surat-menyurat dan arsip pelayanan publik. Namun, penerapan ini masih terbatas karena infrastruktur dan keterampilan staf yang belum merata.

Menurut Yudhistira (2020), digitalisasi administrasi publik di daerah membutuhkan prasyarat penting, yakni pelatihan berbasis teknologi, perangkat yang memadai, serta komitmen kepemimpinan daerah dalam mendorong inovasi pelayanan.

* **Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Internal**: Pemerintah distrik mulai menerapkan format laporan kinerja bulanan untuk tiap seksi dan melakukan evaluasi triwulan terhadap capaian administrasi.

Pendekatan ini sesuai dengan konsep manajemen berbasis hasil (Result-Based Management) sebagaimana dijelaskan oleh Kettl (2017), di mana evaluasi kinerja secara sistematis menjadi kunci untuk perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan.

#### **3. Tantangan Implementasi Strategi**

Meskipun beberapa strategi telah dijalankan, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti:

* Keterbatasan anggaran operasional yang dialokasikan khusus untuk peningkatan kapasitas SDM.
* Kurangnya pendampingan teknis dalam penggunaan sistem digital.
* Adanya resistensi dari sebagian aparatur yang belum terbiasa dengan perubahan sistem kerja baru.

Menurut Dwiyanto (2015), resistensi terhadap perubahan dalam birokrasi daerah sering kali muncul akibat belum adanya perubahan budaya kerja dan minimnya kepemimpinan transformasional. Hal serupa ditegaskan oleh Osborne (2018), bahwa keberhasilan reformasi administrasi tidak hanya bersandar pada sistem dan prosedur, tetapi juga pada kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan berinovasi.

#### **4. Rekomendasi Strategis**

Berdasarkan temuan penelitian, strategi yang direkomendasikan untuk peningkatan kapasitas manajemen administrasi di Distrik Sorong Timur antara lain:

* **Penguatan pelatihan berbasis kebutuhan kerja (training needs-based)** secaraberkelanjutan**.**
* **Penyusunan SOP administrasi berbasis digital** yang disosialisasikan dan dilatih kepada seluruh aparatur.
* **Pembentukan unit pengawasan internal distrik** yang dapat melakukan evaluasi rutin terhadap proses administrasi dan pelayanan.

Strategi ini didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang menurut Sutrisno (2021) meliputi partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas.

#### **5. Peran Kepemimpinan dalam Mendorong Perubahan Administratif**

Kepemimpinan memiliki peran penting dalam mendukung transformasi kapasitas administrasi. Di Distrik Sorong Timur, hasil wawancara menunjukkan bahwa inisiatif perubahan seperti pelatihan staf, penggunaan sistem informasi, dan evaluasi kinerja bulanan sebagian besar bergantung pada dorongan langsung dari kepala distrik. Namun, tantangan muncul ketika pergantian kepemimpinan menyebabkan inkonsistensi kebijakan dan arah reformasi.

Menurut Yukl (2017), keberhasilan organisasi publik sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang transformasional, yakni pemimpin yang mampu memotivasi, menginspirasi, dan memberi teladan dalam proses perubahan organisasi. Tanpa kepemimpinan yang kuat dan berorientasi pada visi jangka panjang, strategi peningkatan kapasitas akan sulit berjalan konsisten.

Hal ini diperkuat oleh hasil studi dari Wicaksono dan Lestari (2020), yang menyatakan bahwa kelemahan dalam kontinuitas kepemimpinan di pemerintahan daerah sering kali menyebabkan stagnasi reformasi birokrasi, terutama pada level kecamatan atau distrik yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap arahan pimpinan.

#### **6. Kolaborasi Antarunit dan Lintas Sektor**

Manajemen administrasi tidak dapat berjalan optimal jika hanya mengandalkan satu unit kerja atau sektor tertentu. Di Distrik Sorong Timur, masih terlihat adanya tumpang tindih wewenang antar seksi, lemahnya koordinasi antara staf pelaksana dan pimpinan, serta keterbatasan kolaborasi dengan instansi di luar distrik seperti OPD kota.

Dalam literatur, Osborne (2018) melalui pendekatan New Public Governance menjelaskan pentingnya tata kelola kolaboratif sebagai bagian dari strategi modern dalam manajemen publik. Kolaborasi lintas unit, bahkan lintas sektor (dengan LSM, swasta, dan komunitas), memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien dan penciptaan inovasi dalam pelayanan publik.

Studi oleh Arifin & Siregar (2021) di tingkat pemerintahan kecamatan di Kalimantan menunjukkan bahwa pembentukan forum koordinasi lintas unit secara reguler dapat meningkatkan efisiensi penanganan dokumen administrasi hingga 25% dan mempercepat pengambilan keputusan.

#### **7. Faktor Sosial dan Budaya Lokal**

Dalam konteks Papua Barat, termasuk Kota Sorong, faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan administrasi publik. Peneliti menemukan bahwa dalam beberapa kasus, pengambilan keputusan administratif sering kali harus mempertimbangkan struktur adat, hierarki sosial lokal, serta pendekatan komunikatif yang sesuai dengan norma setempat.

Menurut Soetomo (2016), pembangunan kelembagaan dan reformasi birokrasi di daerah harus memperhatikan konteks sosial-budaya lokal agar program tidak ditolak atau diabaikan oleh masyarakat. Artinya, strategi peningkatan kapasitas administrasi juga perlu bersifat kontekstual dan adaptif.

Penyesuaian ini penting agar reformasi tidak hanya bersifat formalistik (mengikuti prosedur administratif), melainkan benar-benar diterima oleh para pemangku kepentingan lokal. Darmaningtyas (2017) menekankan bahwa dalam birokrasi daerah, penerapan kebijakan sering gagal karena tidak memperhitungkan kondisi lokal, baik dari sisi budaya kerja maupun relasi sosial.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas manajemen administrasi di Distrik Sorong Timur masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural, mulai dari keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, belum optimalnya pemanfaatan teknologi, lemahnya sistem evaluasi internal, hingga rendahnya koordinasi antarunit kerja. Meski demikian, telah terdapat sejumlah inisiatif strategis yang dilakukan oleh pemerintah distrik, seperti pelatihan aparatur, penggunaan sistem informasi digital, dan pelaksanaan evaluasi kinerja periodik.

Strategi peningkatan kapasitas yang paling relevan dalam konteks Distrik Sorong Timur meliputi:

1. **Pengembangan SDM s**ecara berkelanjutan melalui pelatihan yang berbasis kebutuhan kerja dan penguatan kepemimpinan transformasional di tingkat distrik.
2. **Digitalisasi sistem administrasi** yang didukung oleh infrastruktur dan pelatihan teknis, guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik.
3. **Penguatan sistem monitoring dan evaluasi**, agar kinerja aparatur dapat diukur dan ditindaklanjuti secara sistematis.
4. **Penguatan kolaborasi lintas unit dan pelibatan aktor lokal**, agar proses administrasi lebih adaptif terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat setempat.

Temuan ini memperkuat pandangan para pakar dalam satu dekade terakhir bahwa peningkatan kapasitas administrasi pemerintahan daerah harus bersifat holistik, berkelanjutan, dan kontekstual. Selain pendekatan teknis, strategi peningkatan kapasitas juga memerlukan dukungan kebijakan yang konsisten, kepemimpinan yang kuat, serta partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan.

Dengan demikian, implementasi strategi peningkatan kapasitas administrasi di tingkat distrik, termasuk di Distrik Sorong Timur, bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga bagian integral dari penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, M., & Siregar, D. (2021). Reformasi birokrasi dan efisiensi pelayanan publik di tingkat kecamatan. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 11(2), 95–108. https://doi.org/10.24843/jian.2021.v11.i02

Darmaningtyas. (2017). Membangun birokrasi partisipatif di Indonesia. Pustaka Pelajar.

Dwiyanto, A. (2015). Reformasi birokrasi publik di Indonesia. Gadjah Mada University Press.

Haris, S., & Sari, N. (2018). Manajemen pemerintahan daerah: Kinerja dan kapasitas aparatur. Rajawali Pers.

Kettl, D. F. (2017). The transformation of governance: Public administration for the twenty-first century America (2nd ed.). Johns Hopkins University Press.

Nugroho, R. (2019). Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan. Elex Media Komputindo.

OECD. (2019). Government at a Glance 2019. Organisation for Economic Co-operation and Development. https://doi.org/10.1787/gov\_glance-2019-en

Osborne, S. P. (2018). From public service-dominant logic to public service logic: Are public service organizations capable of co-production and value co-creation? Public Management Review, 20(2), 225–231. https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1350461

Soetomo. (2016). Pemberdayaan masyarakat: Membangun masyarakat madani. Pustaka Pelajar.

Sutrisno, E. (2021). Desentralisasi dan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Prenadamedia Group.

UNDP. (2020). Capacity development: A UNDP primer. United Nations Development Programme. https://www.undp.org/publications/capacity-development-primer

Wicaksono, A., & Lestari, I. (2020). Kepemimpinan transformasional dan implementasi reformasi birokrasi: Studi di kabupaten/kota. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 8(1), 45–57. https://doi.org/10.22146/jmpp.2020.v8.i1.45

Yudhistira, M. H. (2020). Digitalisasi administrasi publik di Indonesia: Peluang dan tantangan. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 7(1), 15–27. https://doi.org/10.22146/japi.2020.7.1.15

Yukl, G. (2017). Leadership in organizations (8th ed.). Pearson Education.